



# Strategi Peningkatan Pengawasan Internal Daerah Tertinggal : Studi di Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya Papua

Kelina Yoman<sup>1</sup>, Fedianty Augustinah<sup>2</sup>, Aris Sunarya<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: [fedianty.augustinah@unitomo.ac.id](mailto:fedianty.augustinah@unitomo.ac.id)

## Abstrak

Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan konteks lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Inspektorat Daerah dan OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, sulitnya akses geografis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya tindak lanjut hasil audit menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

*Kata Kunci: pengawasan internal, daerah tertinggal, inspektorat, strategi penguatan, Papua*

## Abstract

Internal oversight plays a strategic role in ensuring accountability and effective governance, particularly in underdeveloped regions such as Puncak Jaya Regency, Papua. This study aims to identify key challenges in implementing internal oversight and formulate strengthening strategies tailored to the local context. The method used was a descriptive qualitative approach with a single case study. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation studies of the Regional Inspectorate and related Regional Apparatus Organizations (OPD). The results indicate that the limited number of certified auditors, difficult geographic access, minimal budget allocation, and weak follow-up of audit results are the main obstacles to effective oversight. Recommended strengthening strategies include increasing auditor capacity, digitizing risk-based audits, strengthening local regulations, and cross-agency collaboration. These findings emphasize the importance of an adaptive and responsive oversight approach to the characteristics of 3T regions to encourage transparent, accountable, and participatory local governance.

*Keywords: internal supervision, disadvantaged areas, inspectorate, strengthening strategy, Papua*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengawasan internal merupakan komponen esensial dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum (Arens et al., 2019). Namun, efektivitas fungsi pengawasan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, geografis, dan sumber daya yang tersedia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua (BPKP, 2018).

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 126 Tahun 2022, Kabupaten Puncak Jaya diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal dengan tantangan berat di bidang infrastruktur, kapasitas SDM, dan akses layanan publik. Dalam kondisi seperti itu, pengawasan internal tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menguji keberpihakan kebijakan publik terhadap keadilan sosial dan kualitas layanan yang merata (Kementerian Desa PDTT, 2022).

Menurut laporan (BPKP, 2023a), hingga kini hanya 32% Inspektorat di Indonesia yang mencapai level kapabilitas 3 dari skala 5, menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis risiko dan teknologi. Tantangan pengawasan internal di daerah seperti Puncak Jaya tidak hanya berasal dari minimnya jumlah auditor bersertifikat dan keterbatasan anggaran, tetapi juga akses wilayah yang sulit dijangkau dan independensi yang rentan karena posisi APIP di bawah kepala daerah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya, serta merumuskan strategi penguatan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan daerah tertinggal.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan struktural dan geografis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan pengawasan internal?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap program pembangunan daerah di Kabupaten Puncak Jaya?
3. Strategi penguatan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di daerah tertinggal seperti Puncak Jaya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal.
2. Menganalisis efektivitas pengawasan internal terhadap akuntabilitas program pembangunan daerah.
3. Merumuskan strategi penguatan pengawasan internal yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal.

### 1.4 Literatur Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko dalam konteks daerah tertinggal. (Yuliana & Soedjono, 2021), menekankan bahwa pengawasan konvensional kurang efektif di wilayah 3T dan mendorong adopsi pendekatan berbasis risiko yang kontekstual. (Effendi, 2021), menggarisbawahi perlunya reformasi peran Inspektorat agar lebih strategis dalam mendorong akuntabilitas daerah.

Sementara itu, (Handayani, 2022), menemukan bahwa minimnya tindak lanjut hasil audit menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan. Dalam studi lain, (Putri, 2021), menjelaskan bahwa penerapan risk-based audit secara signifikan membantu fokus pengawasan pada area dengan risiko tinggi. (Huda, 2020), juga menegaskan bahwa transformasi digital menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pengawasan di daerah terpencil. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan penting dalam merancang strategi penguatan pengawasan internal di Kabupaten Puncak Jaya.

### 1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa efektivitas pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, khususnya di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Oleh karena itu, kerangka berpikir dirancang secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 1. Alur efektivitas pengawasan wilayah 3T



Sumber: Penelitian Oleh Penulis (2025).

Pengawasan internal di daerah tertinggal dipengaruhi oleh konteks geografis, kapasitas kelembagaan, serta strategi yang diterapkan. Faktor kontekstual wilayah 3T seperti aksesibilitas terbatas, minimnya SDM, dan lemahnya

infrastruktur menyebabkan munculnya tantangan dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan auditor, anggaran rendah, dan tindak lanjut yang tidak optimal.

Melalui analisis peran Inspektorat sebagai APIP, penelitian ini mengidentifikasi perlunya strategi penguatan berbasis lokal, seperti peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit, revisi regulasi daerah, dan kolaborasi lintas lembaga. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah tertinggal.

## 1.6 Landasan Teori

### 1.6.1 Pengawasan Internal (*Internal Control/Internal Audit*)

Pengawasan internal adalah proses sistematis yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan regulasi.

Menurut (Kadarisman, 1997), Internal control adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya sesuai dengan planning yang telah ditentukan.

Menurut Dewan Standar (Konrath, 2001), Internal control is the process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives. (COSO, 2013), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas lima komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
5. Pemantauan (*monitoring activities*)

### 1.6.2 Efektivitas Pengawasan Internal

Efektivitas pengawasan internal adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi audit internal dalam mencapai tujuan pengawasan, seperti peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, dan tindak lanjut temuan.

Menurut (The Institute of Internal Auditors, 2019), Effectiveness of internal auditing depends on the competence of the internal auditor and the degree of organizational independence from operational units. (Citrawati, 2009), menambahkan Independensi auditor internal memungkinkan adanya penilaian yang objektif terhadap sistem dan aktivitas organisasi, yang mendukung keberhasilan pengawasan.

### 1.6.3 Pengawasan di Daerah Tertinggal

Pengawasan di daerah tertinggal merujuk pada proses audit dan pengendalian yang dilakukan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan mempertimbangkan tantangan geografis, keterbatasan SDM, dan infrastruktur. Menurut (BPKP, 2023), Pengawasan di daerah 3T memerlukan pendekatan berbasis risiko dan adaptif, karena karakteristik wilayah yang tidak memungkinkan pengawasan konvensional secara menyeluruh.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus tunggal pada Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena pengawasan internal dalam konteks geografis dan kelembagaan yang khas di daerah tertinggal. Menurut (Yin, 2018), studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi suatu sistem atau kejadian dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks.

### 2.1 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Informan utama terdiri atas kepala inspektorat, auditor internal, pejabat struktural, serta perwakilan dari perangkat daerah (OPD) terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria mereka yang memahami proses pengawasan dan terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci untuk menggali pengalaman, pandangan, dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan.
- Observasi langsung terhadap aktivitas kelembagaan dan kondisi geografis yang memengaruhi efektivitas pengawasan.
- Studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil audit.

### 2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model (Miles et al., 2014), yang meliputi:

1. Reduksi data – merangkum, memilah, dan memfokuskan data penting.
2. Penyajian data – menyusun informasi dalam bentuk naratif dan tematik.

3. Penarikan kesimpulan – menginterpretasi makna temuan secara logis dan relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tantangan Pengawasan Internal di Kabupaten Puncak Jaya

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengawasan internal di Kabupaten Puncak Jaya menghadapi tantangan struktural dan geografis yang signifikan. Pertama, dari sisi sumber daya manusia, jumlah auditor aktif sangat terbatas dan belum seluruhnya tersertifikasi. Hal ini berdampak pada kualitas dan jangkauan audit yang dilakukan. Kedua, kondisi geografis wilayah yang bergunung-gunung dan minim infrastruktur memperlambat mobilitas auditor, bahkan membuat sejumlah wilayah tidak dapat dijangkau secara langsung. Ketiga, keterbatasan anggaran operasional pengawasan menyebabkan rendahnya frekuensi dan intensitas audit.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (BPKP, 2023), yang menyebutkan bahwa di daerah 3T, keterbatasan SDM dan akses geografis menghambat efektivitas pengawasan. (Deleon & Denhardt, 2000), juga menekankan pentingnya pengawasan yang responsif terhadap konteks sosial dan wilayah.

Temuan ini didukung oleh wawancara dengan beberapa informan kunci. Kepala Inspektorat menyampaikan bahwa: *“Jumlah auditor kami memang sangat terbatas. Saat ini hanya ada 8 auditor yang aktif, sementara beban audit tiap tahun sangat besar—lebih dari 250 kegiatan dan 20 OPD. Belum lagi wilayah yang sulit dijangkau, seperti Distrik Ilu dan Yambi yang hanya bisa ditempuh lewat udara.”* (W1).

Auditor senior menambahkan bahwa: *“Realisasi audit kami memang tidak pernah mencapai 100%. Tahun lalu hanya sekitar 60–65% dari rencana kerja. Bukan karena tidak mau, tapi karena transportasi, cuaca, dan juga anggaran terbatas.”* (W2).

Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa tantangan utama berkisar pada keterbatasan SDM, akses wilayah, dan minimnya anggaran operasional. Selain itu, informan dari OPD menyatakan: *“Saya merasa hasil audit itu penting, tapi belum semua OPD paham manfaatnya. Kadang dianggap hanya formalitas. Tidak ada sanksi kalau tidak ditindaklanjuti.”* (W3), yang memperkuat data bahwa tindak lanjut belum optimal.

### 3.2 Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Inspektorat

Efektivitas pengawasan diukur melalui capaian indikator seperti persentase tindak lanjut rekomendasi audit dan integrasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan baru mencapai 61%, yang mengindikasikan lemahnya komitmen beberapa OPD terhadap rekomendasi Inspektorat.

Selain itu, sebagian besar audit yang dilakukan bersifat administratif, belum sepenuhnya mengarah pada audit kinerja atau audit tematik berbasis risiko. Hal ini menghambat kontribusi pengawasan terhadap peningkatan nilai guna program (*value for money*). Sebagaimana dinyatakan oleh (Arens et al., 2019), pengawasan yang hanya fokus pada kepatuhan administratif cenderung bersifat reaktif dan kurang berdampak terhadap perbaikan sistemik.

### 3.3 Strategi Penguatan yang Diterapkan dan Direkomendasikan

Beberapa langkah penguatan telah mulai diimplementasikan, seperti pelatihan dasar pengawasan bagi auditor muda, penggunaan aplikasi sederhana untuk pelaporan audit, dan koordinasi dengan BPKP wilayah. Namun, strategi ini belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas dan dukungan anggaran.

Penelitian ini merekomendasikan empat strategi utama:

1. Penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan jumlah auditor bersertifikasi.
2. Digitalisasi audit menggunakan sistem pelaporan daring dan aplikasi audit berbasis risiko yang dapat diakses jarak jauh.
3. Penguatan regulasi lokal, termasuk penerbitan Peraturan Bupati tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Audit untuk memperkuat posisi Inspektorat.
4. Kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan BPKP, KPK, dan Ombudsman untuk supervisi dan pendampingan.

Strategi ini selaras dengan pendekatan *risk-based internal audit* dan prinsip *responsive governance* yang menekankan fleksibilitas serta adaptasi terhadap kondisi daerah.

### 3.4 Analisis Temuan

penelitian ini menempatkan *pengawasan internal* sebagai instrumen utama tata kelola pemerintahan yang efektif di daerah tertinggal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama di Puncak Jaya—terbatasnya SDM auditor, hambatan geografis, rendahnya anggaran, serta lemahnya tindak lanjut hasil audit—selaras dengan indikator dalam kerangka pengawasan berbasis risiko dan adaptif.

Secara teoritis, lima komponen (COSO, 2013), control environment, risk assessment, control activities, information & communication, monitoring) belum berjalan optimal. Misalnya:

- Control environment terganggu karena kurangnya auditor bersertifikasi.
- Risk assessment belum dilakukan secara sistematis.

- Monitoring masih lemah, dibuktikan dengan rendahnya tindak lanjut rekomendasi.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Lapangan

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
SDM Auditor	8 auditor aktif untuk 20+ OPD	Rasio tidak ideal, beban tinggi
Akses Wilayah	60% distrik sulit dijangkau	Audit lapangan tidak efisien
Anggaran	0,7% dari APBD	Operasional pengawasan terbatas
Tindak Lanjut	61% dari 54 rekomendasi	Lemahnya komitmen OPD
Efektivitas Audit	65% realisasi RKAT	Evaluasi tidak maksimal

Sumber: Penelitian oleh Penulis (2025)

Analisis Keseluruhan Secara umum, pengawasan internal di Kabupaten Puncak Jaya belum optimal. Namun, pondasi kelembagaan dan kesadaran akan pentingnya pengawasan telah terbentuk. Pendekatan berbasis risiko, strategi digital, serta kolaborasi lintas institusi menjadi kunci untuk menjadikan Inspektorat sebagai pilar utama tata kelola daerah di wilayah tertinggal. Hal ini menguatkan teori pengawasan adaptif sebagaimana dinyatakan oleh Deleon dan (Deleon & Denhardt, 2000), bahwa sistem pengawasan harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan geografis wilayah tempat ia diterapkan.

### 3.5 Perbandingan dengan studi sebelumnya

Tabel 2. Temuan Utama Pengawasan Internal Inspektorat Puncak Jaya

Studi Sebelumnya	Fokus & Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
Yuliana & Soedjono (2021)	Pengawasan di Papua berbasis risiko lebih efektif daripada pendekatan administratif	Penelitian ini menguatkan argumen tersebut, dengan mendorong digitalisasi dan RBIA di Inspektorat Puncak Jaya
Handayani (2022)	Rendahnya efektivitas pengawasan disebabkan persepsi audit hanya administratif	Ditemukan juga di Puncak Jaya bahwa beberapa OPD tidak kooperatif dan hanya memandang audit sebagai formalitas
Effendi (2021)	Tindak lanjut audit rendah akibat tidak adanya sanksi yang jelas	Temuan serupa terjadi di Puncak Jaya, hanya 61% rekomendasi ditindaklanjuti karena lemahnya regulasi
Researchgate Aceh (2022)	Pelatihan auditor meningkatkan kapabilitas APIP	Direkomendasikan pula di Puncak Jaya, terutama pelatihan CIA dan audit berbasis risiko
MMC Kalteng (2022)	Audit digital efektif menjangkau daerah sulit akses	Penelitian ini merekomendasikan pengembangan aplikasi audit offline di wilayah tanpa jaringan internet

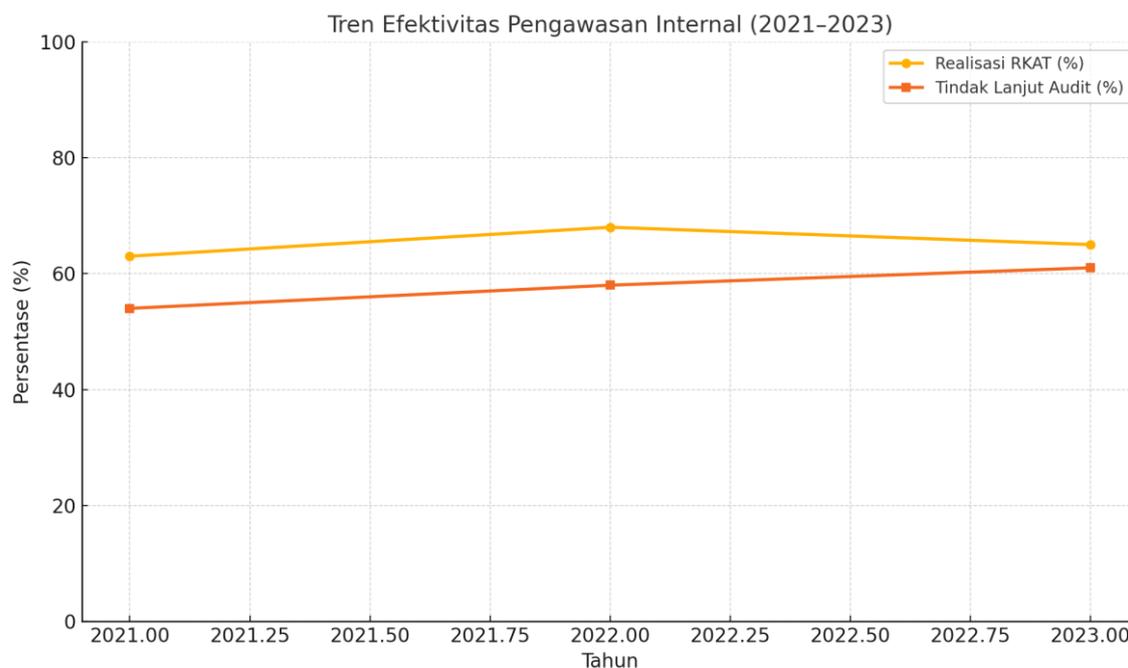
Sumber: Penelitian oleh Penulis (2025)

Temuan empiris konsisten dengan kerangka teori dan praktik pengawasan adaptif di daerah 3T. Penguatan institusional, pemanfaatan teknologi, serta reformasi regulatif menjadi kebutuhan strategis untuk menjadikan Inspektorat Puncak Jaya sebagai motor pengawasan yang responsif dan berdampak.

### 3.6 Evaluasi Pengawasan Internal

Guna memperkuat analisis kualitatif, data sekunder kuantitatif dianalisis untuk melihat tren efektivitas pengawasan.

Gambar 2. Tren Realisasi RKAT dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya



Sumber: Penelitian oleh Penulis (2025).

Gambar ini menunjukkan perkembangan efektivitas pengawasan internal selama tiga tahun terakhir. Realisasi RKAT meningkat pada 2022 namun mengalami stagnasi pada 2023. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi audit mengalami kenaikan bertahap, mencerminkan adanya perbaikan komitmen OPD meskipun belum optimal. Grafik ini memperkuat urgensi strategi penguatan yang adaptif dan berbasis risiko.

### DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal di daerah tertinggal sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, geografis, dan kelembagaan. Kabupaten Puncak Jaya menghadapi tantangan serius seperti jumlah auditor yang minim, keterbatasan akses ke wilayah audit, serta rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan konvensional tidak cukup adaptif dalam konteks daerah 3T. Sebagaimana dinyatakan oleh (COSO, 2013) dan (The Institute of Internal Auditors, 2019), pengawasan internal yang efektif membutuhkan lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko yang tepat, serta dukungan teknologi dan independensi kelembagaan. Di Puncak Jaya, sebagian besar elemen ini belum berjalan optimal. Misalnya, komponen risk assessment dan monitoring belum terintegrasi secara sistematis dalam siklus audit.

Strategi yang telah dan perlu dilakukan mencerminkan kebutuhan akan pendekatan berbasis risiko dan digital. Implementasi pelatihan auditor, penggunaan teknologi audit offline, serta penguatan regulasi lokal (misalnya Peraturan Bupati tentang tindak lanjut audit) merupakan langkah konkret menuju sistem pengawasan yang lebih responsif dan berdaya guna.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui sinergi lintas institusi, seperti kolaborasi dengan BPKP, KPK, dan Ombudsman. Selain itu, pendekatan pengawasan harus diarahkan pada peningkatan nilai guna (value for money) program pembangunan daerah, bukan hanya sebatas kepatuhan administratif.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan internal di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, hambatan geografis, rendahnya dukungan anggaran, serta lemahnya tindak lanjut audit. Meskipun tantangan tersebut kompleks, solusi strategis dapat dirumuskan melalui penguatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi daerah, serta kolaborasi antarlembaga pengawasan.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat pentingnya pendekatan pengawasan adaptif dan berbasis risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Praktisnya, keberhasilan strategi ini sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan keberanian birokrasi lokal dalam mendorong tata kelola yang lebih baik dan partisipatif.

Dengan demikian, pengawasan internal bukan hanya instrumen administratif, tetapi pilar utama dalam pembangunan berkeadilan di wilayah tertinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2019). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson.
- BPKP. (2018). *Pedoman Audit Kinerja Pemerintah Daerah*.
- BPKP. (2023a). *Laporan Kapabilitas APIP Nasional Tahun 2023*.
- BPKP. (2023b). *Panduan Audit Internal Berbasis Risiko Pemerintah Daerah*.
- Citrawati, N. M. (2009). Pengaruh Independensi terhadap Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(2).
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Deleon, P., & Denhardt, R. B. (2000). The Political Theory of Administrative Responsiveness. *Public Administration Review*, 60(5), 363–368.
- Effendi, T. (2021). Reformasi Inspektorat dalam Mendorong Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 7(1), 45–58.
- Handayani, L. (2022). Efektivitas Audit Internal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah*, 11(2), 101–115.
- Huda, M. (2020). Transformasi Inspektorat dalam Era Digital. *Jurnal Reformasi Pemerintahan*, 5(2), 67–75.
- Kadarisman, S. (1997). *Manajemen Personalia*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Kementerian Desa PDTT. (2022). *Penetapan Daerah Tertinggal 2020–2024*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Rekomendasi Penguatan APIP sebagai Early Warning System*.
- Konrath, L. F. (2001). *Auditing: Concepts and Applications*. South-Western College Pub.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Putri, A. R. (2021). Penerapan Risk-Based Audit pada Pengawasan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 21–34.
- The Institute of Internal Auditors. (2019). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. The IIA.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuliana, E., & Soedjono, A. (2021). Pengawasan Adaptif di Daerah Tertinggal: Studi Kasus Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 144–159.